

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI
UPAYA MENDORONG MOBILITAS SOSIAL DALAM BIDANG
PENDIDIKAN PADA WARGA DESA TINDALUN, KABUPATEN
ENREKANG**

*THE EFFECTIVENESS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM
(PKH) AS AN EFFORT TO ENCOURAGE SOCIAL MOBILITY IN
THE FIELD OF EDUCATION, AMONG TINDALUN VILLAGE
RESIDENTS, ENREKANG REGENCY*

SKRIPSI

Juwita

E031191032



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI
UPAYA MENDORONG MOBILITAS SOSIAL DALAM BIDANG
PENDIDIKAN PADA WARGA DESA TINDALUN, KABUPATEN
ENREKANG**

SKRIPSI

Juwita

E031191032



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN
SOSIOLOGI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

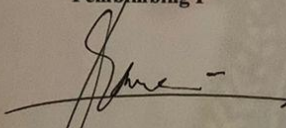
HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI
UPAYA MENDORONG MOBILITAS SOSIAL DALAM BIDANG
PENDIDIKAN PADA WARGA DESA TINDALUN, KABUPATEN
ENREKANG
NAMA : JUWITA
NIM : E031191032

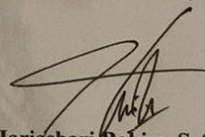
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. M. Ramli AT, M. Si
NIP. 196607011999031002

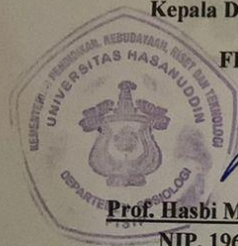
Pembimbing II

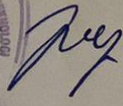

Hariashari Rahim, S. Sos., M.Si.
NIP. 198405072021073001

Mengetahui

Kepala Departemen Sosiologi

FISIP UNHAS




Prof. Hasbi Marissangan, M.Si, Ph.D
NIP. 196308271991031003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh





NAMA : JUWITA
NIM : E031191032
JUDUL : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
SEBAGAI UPAYA MENDORONG MOBILITAS
SOSIAL DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA
WARGA DESA TINDALUN KABUPATEN
ENREKANG

Pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 24 Oktober 2023

Tempat: Ruang Rapat Departemen Sosiologi

Tim Evaluasi Skripsi

Ketua : Dr. M. Ramli AT, M. Si 
Sekretaris : Hariashari Rahim, S. Sos., M.Si. 
Anggota : Dr. Muh. Iqbal Latief M.Si. 
Dr. Andi Ahmad Hasan T., S.St, M. Si 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : JUWITA

NIM : E031191032

JUDUL : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
SEBAGAI UPAYA MENDORONG MOBILITAS SOSIAL
DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA WARGA DESA
TINDALUN KABUPATEN ENREKANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2023



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sudut pandang cara kita melihat dunia, menciptakan dunia yang kita lihat “Berry Neil Kaufnan”

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua, sahabat, serta keluarga yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang luar biasa untuk saya serta telah memberikan dukungan tidak henti-hentinya. Skripsi ini juga dipersembahkan untuk semua pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tindalun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul *Efektivitas Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Mendorong Mobilitas Sosial di Bidang Pendidikan pada Warga Desa Tindalun, Kabupaten Enrekang* ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Kepada bapak **Dr. M. Ramli AT, M. Si** selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dukungan, serta memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada bapak **Hariashari Rahim, S. Sos., M.Si.** selaku pembimbing II penulis, terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam sejak awal penyusunan skripsi hingga selesai.

Selain itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak **Mahmud** dan Ibu **Juriati** yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasehat, serta dukungan, baik dalam secara moral maupun material.
2. Adik kandung penulis, **Arafah** serta keluarga besar penulis yang dorongan dan dukungan
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas

Hasanuddin.

4. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak **Prof. Hasbi Marissangan, M.Si. Ph.D** selaku Ketua Departemen Sosiologi dan **Dr. M. Ramli AT, M. Si** selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasaniddin.
6. Bapak **Dr. M. Ramli AT, M. Si** dan bapak **Hariashari Rahim, S. Sos., M.Si.** selaku pembimbing yang telah mempercayai serta meluangkan waktu, ilmu dan masukan untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak **Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si.** dan Bapak **Dr. Andi Ahmad Hasan T., S.St, M. Si** selaku penguji ujian skripsi yang telah memberikan masukan dan saran tambahan kepada penulis.
8. Seluruh **Dosen Departemen Sosiologi** yakni Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Semua Staf karyawan FISIP Unhas dan Departemen Sosiologi yang telah memberikan bantuan selama menjadi mahasiswa. Terutama **Pak Pasmudir, S.Hum, M.Si, Pak Hidayat Doe, S.IP., M.Si, dan Ibu Rosnaini, SE** atas segala bantuan dan kemudahan dalam kepengurusan berkas dan akademik.
10. Kepada sahabat tercinta **Nia, Dela, dan Inna** yang selalu ada disaat suka maupun duka. Yang telah sama-sama berjuang hingga sekarang dan tidak pernah bosan memberikan dukungan, perhatian, dan bantuan selama 6 tahun ini.

11. Kepada teman-teman terdekat dan seperjuangan saya yaitu **Putri, Adissa, Aniss, Radiah, Bella, Mustika, Ranet, Indah, Ana, Ria, dan Fitri** yang selalu siap membantu disaat penulis membutuhkan bantuan dan menjadi tempat untuk bertukar cerita. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan skripsi ini.
12. **Teman-teman seperjuangan “Sosiologi 19”** terima kasih telah memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa.
13. **25 responden penerima PKH dan pendamping PKH** yang bersedia meluangkan waktunya dan menjadi responden pada penelitian skripsi ini.
14. **Teman-teman KKN Posko 03 Enrekang Gelombang 108** yang telah menemani dan banyak membantu penulis selama pelaksanaan kegiatan KKN.
15. Semua orang yang membaca skripsi ini

Penulis paham bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perjalanan akademis penulis selanjutnya. Saran dan kritik dapat disampaikan di alamat email: juwitamahmud127@gmail.com

Terima Kasih.
Makassar, 15 Juli 2023

Juwita

ABSTRAK

Juwita, E031191032. Efektivitas Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Mendorong Mobilitas Sosial dalam Bidang Pendidikan pada Warga Desa Tindalun, Kabupaten Enrekang. Dibimbing oleh: Dr. M. Ramli AT, M. Si dan Hariashari Rahim, S. Sos., M.Si. Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tindalun, Kabupaten Enrekang serta pemahaman penerima bantuan terkait program tersebut, serta efektivitas dana bantuan PKH efektif dalam mendorong mobilitas sosial di bidang pendidikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional Robert K. Merton. Pengumpulan data dilaksanakan pada Juli 2023 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik penentuan sampel menggunakan sensus dengan mengambil seluruh populasi yang berjumlah 25 kepala keluarga penerima bantuan PKH bidang pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai alur kegiatan Program Keluarga Harapan di Desa Tindalun yang meliputi: Pertemuan awal, penetapan KPM, penyaluran bansos, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan pendampingan. Serta pemahaman penerima bantuan yang tinggi terkait program. Tujuan awal dalam PKH yang diukur dalam penelitian ini tercapai atau efektif. Tercapainya tujuan awal PKH di Desa Tindalun sekaligus mendorong terjadinya mobilitas sosial dalam bidang pendidikan dengan terjadi peningkatan rata-rata pendidikan anak KPM dibanding orang tuanya dan penduduk di Desa Tindalun sehingga terjadi mobilitas keatas atau vertikal dan terjadi mobilitas antargenerasi.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Kegiatan, Efektivitas, Mobilitas sosial.

ABSTRACT

Juwita, E031191032. The Effectiveness Of The Family Hope Program (PKH) As An Effort To Encourage Social Mobility In The Field Of Education, Among Residents Of Tindalun Village Residents, Enrekang Regency. Supervised by: Dr. M. Ramli AT, M. Si and Hariashari Rahim, S. Sos., M.Si. Sociology department, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to find out what the Family Hope Program (PKH) activities are in Tindalun Village, Enrekang Regency, as well as the understanding of aid recipients regarding the program, as well as the effectiveness of PKH aid funds in encouraging social mobility in the education sector. The theory used in this research is Robert K. Merton's functional structural theory. Data collection was carried out in July 2023 using a quantitative approach. The sampling technique used a census to take the entire population of 25 recipients of PKH assistance in the education sector. The results of this research show that there are various activities for the Family Hope Program in Tindalun Village, which include: initial meeting, determining KPM, distributing social assistance, updating data, verifying commitment, and mentoring. As well as high levels of understanding of aid recipients regarding the program. The initial goals in PKH measured in this study were achieved or effective. The achievement of the initial goals of PKH in Tindalun Village also encourages social mobility in the field of education by increasing the average number of children receiving PKH compared to their parents and residents in Tindalun Village, resulting in upward or vertical mobility and intergenerational mobility.

Keywords: Family Hope Program (PKH), Activities, Effectiveness, Social Mobility.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH) Tujuan dan Mekanisme	15
B. Konsep Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Mobilitas Sosial ...	20
C. Mobilitas Sosial dalam Bidang Pendidikan	23
D. Teori Struktural Fungsionalisme.....	26
E. Kerangka Pikir.....	31
F. Definisi Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
B. Pendekatan dan Strategi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	52
F. Teknik Penyajian Data	54
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56

A. Gambaran Lokasi Desa Tindalun.....	56
B. Struktur Pemerintahan Desa Tindalun.....	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Karakteristik Responden	62
B. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tindalun dan Pemahaman KPM Terkait Program.....	68
C. Keefektifan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mendorong Mobilitas Sosial dalam Bidang Pendidikan	104
BAB VI PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	154
DAFTAR LAMPIRAN.....	158
A. Lampiran Kuesioner	159
B. Lampiran Dokumentasi Penelitian	173
C. Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Sulawesi Selatan.	174
D Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Enrekang.....	175
E. Surat Keterangan Selesai Penelitian	176
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	177
RIWAYAT PENDIDIKAN	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Peta Desa Tindalun	57
Gambar 4. 2. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Tindalun	61
Gambar 5. 1 Alur Pelaksanaan kegiatan PKH di Desa Tindalun	72
Gambar 5. 2. Diagram Materi Kriteria dan Persyaratan	75
Gambar 5. 3. Diagram Jenis Bantuan dan Manfaat PKH	76
Gambar 5. 4. Diagram Penjelasan Komponen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan ..	77
Gambar 5. 6. Diagram Materi Meningkatkan Taraf Hidup KPM	78
Gambar 5. 6. Diagram Materi Menciptakan Pola Perubahan Perilaku KPM Pada Layanan Pendidikan	80
Gambar 5. 7. Diagram Materi Meningkatkan Akses Pendidikan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah	81
Gambar 5. 8. Diagram Materi Mendapatkan Pelayanan Fasdik	82
Gambar 5. 9. Diagram Mendapatkan Pendampingan	88
Gambar 5. 10. Diagram Pemahaman Informasi Jadwal Penyaluran	91
Gambar 5. 11. Diagram Kehadiran Anak di Sekolah Minimal 85%	92
Gambar 5. 12. Diagram Hadir dalam Pertemuan Peningkatan Keluarga (P2K2)	93
Gambar 5. 13. Diagram Pemahaman Materi KPM yang Tidak Mengikuti Pertemuan Dikenakan Sanksi	95
Gambar 5. 14. Diagram Kemampuan Pendamping Memberikan Informasi	100
Gambar 5. 15. Diagram Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Pertemuan PKH	101
Gambar 5. 16. Diagram Dana PKH Bermanfaat Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak ..	109
Gambar 5. 17. Diagram Bantuan PKH Dapat Membiayai Keseluruhan Kebutuhan Pendidikan Anak KPM	116
Gambar 5. 18. Diagram Sumber Dana Untuk Memenuhi Kebutuhan Anak yang Tidak Terpenuhi	120
Gambar 5. 19. Diagram Anak KPM yang Memperoleh KIP Sekolah	127
Gambar 5. 20. Diagram Anak KPM yang Memperoleh KIP Kuliah	130
Gambar 5. 21. Diagram Dana PKH Mampu Menyekolahkan Sampai SMA	138
Gambar 5. 22. Diagram Dana PKH Mampu Menyekolahkan Sampai Perguruan Tinggi ..	139
Gambar 5. 23. Diagram Perbandingan Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Anak Pertama Penerima PKH	141
Gambar 5. 24. Diagram Seberapa Yakin Orang Tua Mewujudkan Cita-Cita Pendidikan Terhadap Anak	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Enrekang Kecamatan Anggeraja ...	6
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4. 2 Sarana Pendidikan	58
Tabel 4. 3 Sarana Olahraga	60
Tabel 5. 1. Distribusi Responden Berdasar Kelompok Usia	64
Tabel 5. 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	65
Tabel 5. 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Suami (Ayah Penerima Manfaat)	66
Tabel 5. 4. Distribusi Responden Berdasarkan Dusun Tempat Tinggalnya	67
Tabel 5. 5. Informasi Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	89
Tabel 5. 6. Materi Pertemuan P2K2 (Materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga)	97
Tabel 5. 7. Absensi Ketidakhadiran Siswa Penerima PKH di Sekolah	107
Tabel 5. 8. Bentuk Alokasi Dana Bantuan PKH oleh KPM	111
Tabel 5. 9. Bentuk Pemanfaatan Kebutuhan Pendidikan	113
Tabel 5. 10. Kebutuhan Pendidikan yang Tidak Terpenuhi	117
Tabel 5. 11. Anak yang Putus Sekolah Disekolahkan oleh PKH	122
Tabel 5. 12. Memperoleh Informasi Beasiswa KIP Sekolah dari Pendamping	126
Tabel 5. 13. Mendapatkan Informasi Beasiswa KIP Kuliah dari Pendamping	129
Tabel 5. 14. Perbandingan Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Tindalun dan Anak Penerima PKH	136
Tabel 5. 15. Jumlah Anak yang Mendapat Bantuan PKH Menurut Tingkat Pendidikan Akhir yang Dicitakan Orang Tuanya	143
Tabel 5. 16. Dengan Adanya PKH Anak dengan Latar Belakang Pendidikan Rendah Mampu Bersekolah	148

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Kuesioner	159
B. Lampiran Dokumentasi Penelitian	173
C. Surat Izin Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan.....	174
D. Surat Izin Penelitian dari PTSP Kabupaten Enrekang	175
E. Surat Keterangan Selesai Penelitian	176

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian bagi sebagian besar negara berkembang. Menurut (Cahyat, 2007), Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan untuk keluar dari kerentanan. Kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan masyarakat Indonesia yang menjadi beban bagi pemerintah.

Tingginya angka kemiskinan di suatu negara memiliki dampak yang besar terhadap aspek kehidupan lainnya. Kualitas hidup penduduk miskin yang rendah akan berimbas pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Kondisi seperti ini akan menyebabkan meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan perlu diupayakan oleh berbagai pihak demi mengangkat taraf hidup masyarakat miskin (Utomo et al., 2019).

Dilansir dari bps.go.id (2022) di Indonesia sendiri terdapat sebesar 26, 16 juta penduduk miskin, Penduduk miskin perkotaan pada maret 2022 berjumlah 11, 82 juta. Sementara persentase Penduduk miskin pedesaan pada maret 2022 sebesar 14, 34 juta. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah

Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk menangani hal tersebut. Penanganan masalah kemiskinan pun sejalan dengan upaya mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Khoirul, 2021).

Pemerintah telah menciptakan beberapa program dalam upaya penanggulangan dan meminimalisir permasalahan kesejahteraan masyarakat khususnya masalah kemiskinan. Salah satu program yang dibentuk adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Laporan Bank Dunia (2006) dalam (Tamrin, 2012), *Making the New Indonesia Work for The Poor* melaporkan bahwa ada 4 alasan pemerintah Indonesia perlu mengembangkan program PKH berdasarkan pada kondisi yang sangat nyata, yaitu masih terdapat sekitar 6,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang hanya mempunyai rata-rata pendapatan Rp130.000,00 per bulan, bahkan di beberapa kabupaten situasinya jauh lebih menyedihkan. Masih tingginya kasus malnutrisi di kalangan anak-anak Indonesia, tingkat kematian ibu melahirkan juga masih tinggi di Indonesia, dan banyak anak-anak dari kalangan keluarga miskin yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya sesuai dengan wajib belajar, yakni maksimal menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP).

Kondisi tersebut membuat Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) kemudian mencanangkan program di tahun 2006, bekerja sama dengan Bank Dunia. Maka dibentuklah program baru yaitu Program Keluarga Harapan. Program ini lebih dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki karakteristik utama, yaitu mensyaratkan perilaku yang harus dilakukan oleh penerima bantuan program. PKH lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat kurang mampu.

Informasi yang didapatkan melalui jurnal Kemkominfo, menyatakan program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 klaster yaitu:

1. Klaster I merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang terdiri dari Program Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Klaster II merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

3. Klaster III merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang terdiri dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur terpenting adalah pencapaian sebuah target. Target atau tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus tujuan PKH adalah sebagai berikut: Pertama, meningkatkan kondisi sosial ekonomi Penerima Manfaat. Kedua, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM. Ketiga, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM. Keempat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi Penerima Manfaat (Daud & Marini, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan mempunyai target agar kehadiran siswa mencapai minimal 85% dan kebutuhan sekolah dapat terpenuhi. Tingkat kehadiran yang rendah dapat menyebabkan kegiatan belajar siswa menjadi terganggu, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat prestasi belajarnya. Kedisiplinan kehadiran masuk sekolah yang masih rendah akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang menyebabkan kemungkinan tidak tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal, Selain itu pemenuhan kebutuhan sekolah sangat diperlukan dan membutuhkan banyak biaya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan PKH dalam jangka panjang dan pendek. Jangka pendek yaitu

terpenuhinya kebutuhan dalam bidang pendidikan, dan dalam jangka panjang setelah mendapatkan pendidikan yang layak dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Tujuan dari PKH sejalan dengan fungsi pendidikan yaitu sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Pendidikan juga dapat menjembatani terjadinya mobilitas sosial. Setiadi dan Kolip dalam bukunya pengantar sosiologi menyatakan jika berbicara mengenai mobilitas sosial maka yang dimaksud tidak lain adalah bentuk perpindahan status dan peranan seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang tinggi begitu pula sebaliknya. Seperti yang dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin bahwa beberapa saluran mobilitas sosial yaitu angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan organisasi keahlian.

Lembaga pendidikan adalah saluran resmi yang paling rasional dalam menentukan pergeseran sosial, sebab sifat dari pola-pola pergeseran sosial dalam jalur pendidikan sangat terbuka yang tidak membedakan warna kulit, kasta, suku, agama, dan faktor pembeda lainnya. Lembaga pendidikan yang memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Dari ketiga komponen tersebut dapat menyebabkan seseorang memperoleh posisi tertentu dalam masyarakat atau lingkungan kerjanya. Hal tersebut dapat menjadi gerak sosial sebagai perubahan, peningkatan maupun penurunan status seseorang dalam masyarakat (Setiadi & Kolip, 2011).

Program Keluarga Harapan (PKH) juga berkontribusi pada peningkatan kehadiran di sekolah dan fasilitas layanan kesehatan. Kunci keberhasilan program ini terletak pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi *demand* dan *supply* program. Dari sisi *demand*, pemberian bantuan dilaksanakan tepat sasaran dalam menjangkau masyarakat miskin, serta didukung anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan program. Sisi *supply* adalah tersedianya layanan kesehatan dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai. Lembaga pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang digunakan sebagai tempat atau bangunan yang digunakan untuk belajar dan mengajar yaitu dengan dibangunnya sekolah. Adapun jumlah sekolah yang ada di kabupaten Enrekang dan Kecamatan Anggeraja dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1. Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Enrekang Kecamatan Anggeraja

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	
	Kecamatan Anggeraja	Kabupaten Enrekang
SD/ Sederajat	25	242
SMP/ Sederajat	7	71
SMA/SMKSederajat	6	38
Total	38	351

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Enrekang 2021

Secara umum program bertujuan agar dapat melayani peserta program dan meningkatkan hubungan peserta program menjadi lebih baik. Selain itu, program

juga akan memiliki tujuan berdasarkan dari kegunaan atau kebutuhan program itu sendiri. Tujuan program ini haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan kebutuhan mengapa program itu akan disusun dan dilaksanakan (Austin & Pinkleton dalam Purwanto, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah dan mempunyai rencana yang telah disusun, untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan pelaksanaan program tersebut yaitu kegiatan. Definisi dari program dan kegiatan menurut Royce, Thyer & Padgett (dalam Purwanto, 2020), Program adalah kumpulan kegiatan terorganisir yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang terorganisir artinya serangkaian tindakan terencana yang dirancang untuk menyelesaikan beberapa masalah.

Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai berbagai kegiatan diantaranya kegiatan pertemuan kelompok dan kegiatan P2K2. Kegiatan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terbaru tentang program PKH dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat dengan pendamping PKH. Melalui pertemuan-pertemuan ini, keluarga penerima manfaat PKH dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan bantuan PKH secara lebih efektif, mengelola keuangan keluarga, dan meningkatkan pola asuh anak. Dengan melibatkan keluarga penerima manfaat secara aktif dalam kegiatan pertemuan, diharapkan mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mencapai tujuan program PKH, seperti

peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Mengenai definisi mengenai program dan kegiatan di atas, hal tersebut dapat relevan mengenai pendapat seorang ahli sosiologi mengenai konsep rasionalitas manusia yang diungkapkan oleh Max Weber.

Seorang ahli sosiologi, Max Weber menyatakan bentuk rasional manusia berkaitan dengan alat pola pikir rasional yang dimiliki oleh manusia meliputi seperangkat alat dalam mendukung suatu kehidupan. Artinya ketika manusia melakukan suatu tindakan manusia mengetahui secara baik apa alat yang digunakan untuk mencapai suatu keinginan dalam kehidupannya maka manusia memilih secara rasional alat yang dipakai untuk menghadapi situasi dan kondisi kehidupan. Selain itu, bentuk rasional manusia berkaitan dengan tujuan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai alat tersebut sudah dipilih dalam mencapai tujuan yang meliputi aspek kultural dan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, manusia akan paham dan mengerti tindakan yang dilakukan mempunyai arah serta tujuan tertentu (Irwan & Indraddin, 2021).

Terkait konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping memiliki peran krusial untuk memahami dan menerapkan konsep rasionalitas manusia yang diungkapkan oleh Max Weber. Pendamping bertugas untuk memberikan informasi yang tepat dan mendukung keluarga penerima manfaat dalam membuat keputusan yang rasional terkait penggunaan bantuan dan

strategi untuk mencapai tujuan PKH. Pendamping PKH juga bertugas untuk membantu keluarga penerima manfaat dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai opsi atau alat yang tersedia untuk mencapai tujuan mereka, seperti melalui pelatihan keterampilan, pengelolaan keuangan, dan akses ke program-program pendukung lainnya. Dengan pendekatan yang rasional dan penuh pemahaman, pendamping dapat membantu keluarga penerima manfaat PKH untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mencapai tujuan program PKH secara maksimal.

Ketika membahas Program Keluarga Harapan (PKH) yang tentunya memiliki tujuan awal atau target yang harus dicapai, selain dibutuhkan kegiatan agar rancangan atau rencana dari suatu program tercapai. Diperlukan pula sesuatu yang digunakan sebagai alat ukur untuk melihat apakah tujuan awal yang telah dibuat dapat tercapai.

Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Sedarmayanti, menyatakan bahwa sesuatu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tepat dan berhasil, maka sesuatu itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien, artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Susanti et al., 2019). Berdasarkan definisi efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan kerja yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil pekerjaan dan tindakan dilakukan haruslah tepat, jika tidak tepat menyebabkan tujuan tidak tercapai atau dengan kata lain dikatakan tidak efektif.

Program Keluarga Harapan seperti sistem yang dibentuk oleh pemerintah yang terpola dan berulang. Dalam (Ritzer, 2012) Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional berfokus pada kelompok, organisasi, masyarakat dan kebudayaan. Dia menyatakan bahwa semua objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional struktural harus “menggambarkan suatu item yang distandarkan” (yakni terpola dan berulang). Dia memaksudkan hal tersebut sebagai peran sosial, pola kelembagaan, proses sosial, norma-norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial dan alat-alat pengendalian sosial. Program keluarga harapan selain mendapatkan hak, sebagai keluarga penerima manfaat PKH juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban tersebut berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bentuk komitmen dari keluarga penerima manfaat PKH.

Menurut Merton fungsi-fungsi didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat sebagai penyesuaian suatu sistem tertentu.” Akan tetapi ada suatu bias ideologi yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau penyesuaian, karena mereka selalu merupakan konsekuensi-konsekuensi positif. Perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu dapat mempunyai

konsekuensi negatif untuk fakta sosial yang lainnya (Ritzer, 2012: 429). Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan fungsional apabila pola-pola yang telah dibuat atau aturan berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan namun dapat dikatakan disfungsional apabila aturan dan pola-pola yang telah dibuat tidak dijalankan dengan semestinya sehingga hasilnya menjadi tidak fungsional atau disfungsional.

Di Kabupaten Enrekang sendiri penerima bantuan yang berjumlah 14. 563. Pada tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Anggeraja mempunyai 1.541 KPM, di Desa Tindalun terdapat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 98 orang. Terkhusus dalam bidang pendidikan yang berjumlah 25 orang di Desa Tindalun menerima bantuan sejak tahun 2016 pada tahap ke 4. Setelah observasi awal yang telah dilakukan peneliti, pendamping di desa tersebut menyampaikan bahwa masih terdapat penerima manfaat yang tidak menggunakan dana bantuan sesuai dengan tujuan awalnya. Kendala yang dialami aparat pemerintah (pendamping) yang bertugas mengawasi jalannya program keluarga harapan mendampingi 5 desa sekaligus. Hal tersebut mengakibatkan pendamping sedikit kesulitan dalam mengawasi keluarga penerima terutama terkait bagaimana mereka memanfaatkan dana tersebut. Selain itu dari hasil wawancara dengan operator Program Keluarga Harapan (PKH), mengungkapkan bahwa saat dan setelah masa pandemic terjadi perubahan sistem aplikasi verifikasi data sehingga pelaksanaan PKH tidak berjalan sesuai dengan yang ada di buku pedoman

pelaksanaan PKH.

Aspek pemahaman program dalam penelitian ini, yaitu ingin mengetahui berbagai kegiatan PKH di Desa Tindalun dan pemahaman penerima PKH terkait program tersebut. Serta mengukur tercapainya tujuan awal PKH sehingga mendorong terjadinya mobilitas sosial di bidang pendidikan. Dengan memperhatikan suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak, sehingga penulis mengangkat judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Mendorong Mobilitas Sosial di Bidang Pendidikan pada Warga Desa Tindalun, Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apa saja kegiatan PKH di bidang pendidikan pada warga Desa Tindalun, Kabupaten Enrekang dan pemahaman peserta mengenai program tersebut?
2. Apakah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam mendorong mobilitas sosial dalam bidang pendidikan pada warga Desa Tindalun, Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apa saja kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemahaman peserta terkait program tersebut di Desa Tindalun.
2. Untuk mengetahui apakah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam mendorong mobilitas sosial dalam bidang pendidikan di desa Tindalun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis bagi disiplin ilmu sosiologi, manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan keilmuan dalam dunia pendidikan yang sejenis dan memberikan penjelasan mengenai alur kegiatan program keluarga harapan berjalan di Desa Tindalun.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait seberapa berpengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang pendidikan anak di desa Tindalun, juga sebagai upaya mendorong mobilitas sosial.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan bagi pemerintah, khususnya aparat pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menyukseskan program keluarga harapan dan mendorong mobilitas sosial dalam bidang pendidikan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang dapat memberikan Informasi mengenai efektivitas program keluarga harapan sebagai upaya mendorong mobilitas sosial pada warga Desa Tindalun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH), Tujuan, dan Mekanisme

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program bantuan yang memberikan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan PKH sejak tahun 2007 (Andini, 2012).

Laporan Bank Dunia (2006) dalam (Tamrin, 2012), *Making the New Indonesia Work for The Poor* melaporkan bahwa ada 4 alasan pemerintah Indonesia perlu mengembangkan program PKH berdasarkan pada kondisi yang sangat nyata, yaitu:

1. Masih ada sekitar 6,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang hanya mempunyai rata-rata pendapatan Rp130.000,00 per bulan, bahkan di beberapa kabupaten situasinya jauh lebih menyedihkan.
2. Masih tingginya kasus malnutrisi di kalangan anak-anak Indonesia, dimana lebih dari seperempat anak-anak usia 5 tahun mempunyai bobot badan yang berada di bawah ketentuan kesehatan standar. Selain itu masih banyak keluarga-keluarga miskin yang mengonsumsi makanan yang sangat rendah gizi.

3. Tingkat kematian ibu melahirkan juga masih tinggi di Indonesia. Hampir 130 ibu meninggal saat melahirkan dari setiap 100.000 kelahiran, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Kondisi tersebut disebabkan oleh: pertama, perempuan miskin yang hamil tidak secara teratur memeriksakan kesehatannya sebelum melahirkan; dan kedua, perempuan miskin lebih suka atau lebih mampu membayar jasa melahirkan melalui dukun beranak secara tradisional.

4. Banyak anak-anak dari kalangan keluarga miskin yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya sesuai dengan wajib belajar, yakni maksimal menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP). Pencapaian pendaftaran anak sekolah SD dari keluarga miskin lebih rendah dari 45% dan untuk tingkat SMP lebih rendah dari 20%, meskipun wajib belajar sudah dicanangkan secara nasional. Melihat kondisi tersebut Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) kemudian mencanangkan program PKH di tahun 2006, bekerja sama dengan Bank Dunia.

Program perlindungan sosial yang juga dikenal secara internasional dengan Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil mengatasi kemiskinan. Khususnya kemiskinan kronis, di negara-negara tersebut. Sebagai program bantuan pendapatan bersyarat, PKH membuka kesempatan bagi keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan (faskes) dan fasilitas pendidikan (fasdik) di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai digalakkan untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dan

lanjut usia, menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai konstitusi dan amanat Nawacita Presiden Republik Indonesia. Melalui PKH, KM didorong untuk menerima dan menggunakan pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya dan bantuan komplementer secara berkelanjutan (Kemensos.go.id).

Program ini memberikan bantuan tunai kepada penerima manfaat sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Program ini diperuntukkan bagi ibu hamil, menyusui, memiliki anak di bawah usia 5 tahun, dan anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Penerima manfaat adalah seorang ibu atau wanita dewasa yang mengasuh anak dalam rumah tangga, tetapi jika tidak ada ibu. Mereka dapat diwakili oleh bibi, nenek atau kakak perempuan, mereka (Syamsir, 2014).

Program Keluarga Harapan juga memiliki mekanisme dan tujuan dalam pelaksanaannya. Mekanisme dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan kelompok penerima manfaat pkh, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen PKH, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH dan perubahan kepesertaan PKH.

1. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

- a Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b Meringankan beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan tidak mampu.
- c Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Dari tujuan di atas dalam jangka pendek Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat meringankan beban penerima manfaat dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan. Dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan (Astari, 2018)

2. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan

Kriteria Penerima Manfaat Komponen Pendidikan PKH yaitu anak usia sekolah, yaitu anak usia 6-21 tahun yang belum tamat sekolah. wajib belajar yang tamat SD/SMP atau SMP/SMA sederajat dan SMA/MA sederajat.

3. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Pkh di Bidang Pendidikan

- a Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Berhak Untuk Mendapatkan:

- 1) Bantuan sosial PKH
 - 2) Layanan di fasilitas pendidikan
 - 3) Program bantuan komplementer (tambahan) di bidang pendidikan (KIP)
- b. Kewajiban Kelompok Penerima PKH di Bidang Pendidikan
- 1) Komponen pendidikan terdiri dari kewajiban sekolah 12 tahun bagi anak usia sekolah yang harus mengikuti kegiatan pembelajaran, setidaknya kehadiran 85% dari total kehadiran secara keseluruhan.
 - 2) KPM berpartisipasi dalam pertemuan kelompok bulanan atau pertemuan kemampuan keluarga (P2K2)
 - 3) Anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali dalam keadaan yang tidak bisa diantisipasi/ tidak terduga
 - 4) Sanksi dikenakan kepada KPM yang tidak memenuhi kewajibannya. Mekanisme pemberian sanksi dijelaskan lebih rinci dalam Pedoman Pelaksanaan PKH

Suatu program dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal yang dilaksanakan dan mampu menjangkau masyarakat yang merupakan tujuan utama dari program. Tujuan akhir PKH bidang pendidikan adalah meningkatkan jumlah anak RTSM, khususnya anak SD/MI dan SMP/MTS, serta mengurangi jumlah pekerja di bawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tujuan dari pelatihan PKH adalah untuk mendorong penerima bantuan RTSM untuk

menyekolahkan anaknya dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya mengikuti pembelajaran, minimal 85% dari hari efektif sekolah perbulan selama tahun ajaran (Direktorat jaminan Sosial, 2013).

B. Konsep Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Mobilitas Sosial

1. Konsep Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam mencapai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disusun maka dibutuhkan pelaksanaan program tersebut yaitu kegiatan. Seperti definisi dari program dan kegiatan menurut Royce, Thyer & Padgett (dalam Purwanto, 2020: 116). Program adalah kumpulan kegiatan terorganisir yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang terorganisir artinya serangkaian tindakan terencana yang dirancang untuk menyelesaikan beberapa masalah.

Program keluarga harapan terdapat serangkaian kegiatan dalam pelaksanaannya meliputi: pertemuan awal, penetapan KPM, penyaluran bansos, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan pendampingan. Kegiatan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terbaru tentang program PKH dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat dengan pendamping PKH. Selain itu, melalui pertemuan-pertemuan ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan bantuan PKH secara lebih efektif, mengelola keuangan keluarga, dan meningkatkan pola asuh anak.

Dengan melibatkan keluarga penerima manfaat secara aktif dalam kegiatan pertemuan. Diharapkan mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mencapai tujuan dari PKH, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan definisi program dan kegiatan di atas. Hal tersebut dapat relevan dengan pendapat seorang ahli sosiologi mengenai konsep rasionalitas manusia yang diungkapkan oleh Max Weber.

Seorang ahli sosiologi, Max Weber menyatakan bentuk rasional manusia berkaitan dengan alat pola pikir rasional yang dimiliki oleh manusia meliputi seperangkat alat dalam mendukung suatu kehidupan. Artinya ketika manusia melakukan suatu tindakan manusia mengetahui secara baik apa alat yang digunakan untuk mencapai suatu keinginan dalam kehidupannya maka manusia memilih secara rasional alat yang dipakai untuk menghadapi situasi dan kondisi kehidupan. Selain itu, bentuk rasional manusia berkaitan dengan tujuan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai alat tersebut sudah dipilih dalam mencapai tujuan yang meliputi aspek kultural dan tindakan tersebut. Oleh sebab itu manusia akan paham dan mengerti tindakan yang dilakukan mempunyai arah serta tujuan tertentu (Irwan & Indraddin, 2021).

2. Konsep Mobilitas Sosial

Menurut (Nasution, 2010) mobilitas sosial adalah kemampuan individu untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Orang dari kelas sosial yang lebih tinggi ke kelas sosial yang lebih rendah, dan dari kelas sosial yang tinggi ke kelas yang lebih rendah disebut vertikal dan kelas sosial dalam derajat ke arah yang sama atau horizontal. Horton dan Hunt mendefinisikan mobilitas sosial sebagai peralihan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sedangkan menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerakan dalam suatu struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengarahkan organisasi suatu kelompok sosial. (Setiadi. M & Kolip. U, 2011).

Jenis mobilitas sosial:

- 1) Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari lapisan sosial yang lain ke yang lebih tinggi atau rendah. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua bagian, yaitu. mobilitas vertikal naik turun. Mobilitas vertikal ke atas terjadi ketika status seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi, mobilitas ke bawah lainnya terjadi ketika status seseorang menurun ke tingkat yang lebih rendah (Nasution, 2010).
- 2) Mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan orang atau objek dari satu kelompok sosial yang satu ke status sosial lain yang setara (Soekanto, 2017).
- 3) Mobilitas sosial geografis, yaitu perpindahan individu atau objek dari satu tempat ke tempat lain, yang mempengaruhi kedudukan sosialnya.

4) Mobilitas Antargenerasi

Setiadi & Kolip (2011) dalam bukunya yang berjudul pengantar sosiologi membahas mengenai mobilitas sosial Antargenerasi. Mobilitas antargenerasi ditandai dengan perkembangan atau peningkatan kedudukan dalam satu baris keturunan, yang tidak hanya menunjukkan kedudukan sosial dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selain itu, mobilitas antargenerasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Mobilitas integrasi adalah perubahan status sosial yang terjadi antara beberapa generasi atau hubungan dari satu generasi ke generasi yang lain yaitu generasi orang tua ke anak. Jika generasi sekarang tetap menempati strata sosial yang sama dengan generasi sebelumnya, gejala ini tidak menunjukkan adanya integrasi mobilitas sosial.
- 2) Mobilitas intragenerasi adalah perubahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi. Misalnya, anak ketiga berstatus lebih tinggi dari dua kakaknya. Mungkin karena anak ketiga lebih baik secara finansial, ia menghasilkan modal untuk digunakan kedua kakaknya untuk bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial antar generasi mengalami penurunan dalam satu generasi.

C. Mobilitas Sosial dalam Bidang Pendidikan

Pitirim A. Sorokin mengemukakan beberapa saluran bagi tipe gerak sosial vertikal dalam kehidupan sosial, diantaranya angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, keahlian (*skill*). Lembaga pendidikan sebagai salah satu lembaga yang memberikan bekal keterampilan (*competency*), keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*). Kepemilikan tiga komponen menyebabkan seseorang memperoleh posisi tertentu dalam masyarakat atau dalam lingkungan kerjanya. Lembaga pendidikan adalah saluran resmi yang paling rasional dalam menentukan pergeseran sosial, sebab sifat dari pola-pola pergerakan pergeseran sosial dalam jalur pendidikan ini adalah sangat terbuka. Hal ini dikarenakan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh seseorang atau kelompok orang lewat jalur ini tidak dibedakan perbedaan warna kulit, kasta, suku, agama dan faktor-faktor pembeda lainnya. Lembaga pendidikan telah mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi lebih berharga.

Secara universal pendidikan memiliki andil besar dalam mobilitas bangsa yaitu menyangkut harga diri, harkat, dan martabat suatu bangsa di tengah-tengah percaturan antar bangsa. Karena peran pendidikan Indonesia mengalami pergeseran kedudukan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat yang setara dengan bangsa lain melalui daya pikir dan perasaan kebangsaan kaum intelektual timbul semangat nasionalisme dalam membela bangsanya dari pencengkraman dan penindasan bangsa lain.

Selain itu, gelar akademik hingga saat ini masih menjadi kebanggaan anggota masyarakat inilah sebabnya terkadang dalam dunia pendidikan justru sering menjadi salah kaprah di mana peserta didik lebih mementingkan gelar-gelar akademik daripada kompetensi yang diperoleh melalui lembaga tersebut (Setiadi & Kolip, 2011).

Menurut Nasution dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkatkan golongan sosial yang lebih tinggi pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Pada zaman dahulu keturunan lah yang menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus karena sistem golongan yang kata tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan kemampuan pendidikan untuk memperbaiki nasib seseorang.

Dengan memperluas dan meratakan pendidikan diharapkan dicairkannya batas-batas antara golongan-golongan sosial. Diharapkan bahwa kesempatan belajar yang sama membuka jalan bagi setiap anak untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkannya kewajiban belajar atau pendidikan universal. Memberikan pengetahuan atau keterampilan yang sama bagi semua anak dari semua golongan sosial dengan demikian perbedaan golongan akan dikurangi

jika pun tidak dapat dihapuskan seluruhnya dalam kenyataan cita-cita itu demikianlah mudah diwujudkan. Diduga bahwa bertambah tingginya taraf pendidikan makin besarnya kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah.

Melalui pemaparan mengenai mobilitas sosial dalam bidang pendidikan diatas. Mengukur mobilitas dalam pendidikan yang pertama, dengan melihat bertambahnya taraf pendidikan atau terjadi kenaikan rata-rata tingkat pendidikan dan yang kedua dengan melihat jenis mobilitas sosial yang sesuai untuk mengukur mobilitas dibidang pendidikan yaitu mobilitas antargenerasi. Mobilitas antar generasi dalam bidang pendidikan dapat diukur dengan melihat pendidikan terakhir orang tua dan anak, jika generasi sekarang tetap menempati pendidikan terakhir yang sama dengan orang tuanya maka gejala tersebut tidak memperlihatkan adanya gejala mobilitas sosial integrasi.

D. Teori Struktural Fungsionalisme

Fungsionalisme struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tersebut tentang hakikat manusia. Fungsionalisme berlandaskan pemahaman manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial. Perwujudannya yang ekstrim fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-

ketentuan yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat (Poloma, 2010).

Aturan yang berada dalam masyarakat biasanya diatur dalam birokrasi, Merton membuat batasan mengenai birokrasi yaitu:

- a. Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal
- b. Ia meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas
- c. Kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi
- d. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokrasi
- e. Status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hirarkis
- f. Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas serta terperinci
- g. Otoritas pada jabatan, bukan pada orang
- h. Hubungan-hubungan antara orang dibatasi secara formal.

Birokrasi pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan prosedur dalam mencapai tujuannya. Struktur birokrasi banyak diwarnai dengan karakteristik dan kapabilitas individu. Aparat negara atau pemerintah dan pelayanan masyarakat secara hierarki sesuai dengan tanggung jawab dan

fungsi dalam tata administrasi. Merton juga berpendapat bahwa setiap objek yang dapat dikenakan analisis fungsional struktural harus mewakili sistem standar (yaitu) berpola dan berulang. Maksudnya hal-hal seperti peran sosial, pola kelembagaan, proses sosial, pola budaya, pola tekstur emosional, budaya, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, sarana kontrol sosial, dll.

Jika dihubungkan dengan fenomena yang akan diteliti, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memiliki pedoman dalam pelaksanaannya yang terorganisir dengan jelas mulai dari tata pelaksanaannya, hak dan kewajiban yang diberikan kepada penerima manfaat, serta sanksi yang dikenakan apabila tidak mengikuti aturan yang telah dibuat. Selain itu terdapat pendamping yang bertugas mengawasi jalannya program tersebut sehingga mempunyai otoritas untuk mengarahkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai PKH, serta mempunyai buku panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan itu ingin diketahui bagaimana aturan yang telah ditetapkan berlaku di masyarakat dan pihak yang mempunyai otoritas dalam birokrasi mempunyai pengaruh yang kuat akan keberhasilan program tersebut.

Fungsionalis struktural awal hampir seluruhnya berfokus pada fungsi satu struktur atau lembaga sosial satu dengan lembaga yang lain. Merton mengkritik beberapa hal, yang pertama adalah fungsionalisme universal, yaitu klaim bahwa semua bentuk sosial dan budaya yang diterangkan memiliki

fungsi positif. Merton berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan apa yang kita jumpai di dunia nyata, jelas tidak semua kebiasaan, ide, kepercayaan, dan lainnya memiliki fungsi positif. Selanjutnya, argumen kebutuhan mutlak di sini adalah bahwa semua aspek masyarakat yang tetapkan tidak hanya memiliki fungsi positif, tetapi juga menggambarkan bagian negative dari fungsi umum yang rasional sempurna. Postulat tersebut memunculkan gagasan bahwa semua struktur dan fungsi dimaksudkan secara fungsional dalam masyarakat, tidak ada struktur dan fungsi lain yang bekerja dengan baik dalam masyarakat (Ritzer, 2014).

Menurut Merton, analisis awal cenderung mengajarkan bahwa motif subjektif individu dengan fungsi fungsional struktural atau institusi harus fokus pada fungsi sosial daripada motif individu. Menurut Merton, fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi yang dapat diamati dari konsekuensi yang dibuat untuk menyesuaikan titik tertentu dalam sistem, tetapi keputusan yang tidak akurat yang jelas ketika orang hanya fokus pada adaptasi atau adaptasi karena itu selalu merupakan konsekuensi positif terhadap fakta sosial lainnya. Untuk memperbaiki kekurangan fungsi yang serius, gagasan disfungsi dikembangkan, karena struktur atau institusi dapat terlibat dalam pemeliharaan bagian lain dari sistem sosial dan juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif.

Paradigma Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integratif). Merton juga menegaskan bahwa apa yang fungsional bagi suatu kelompok masyarakat dapat tidak fungsional bagi keseluruhan oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisis harus terperinci. Sebagaimana sudah kita ketahui, Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional.

Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional, yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif. Jika dikorelasikan dengan penelitian ini Program Keluarga Harapan (PKH) dapat fungsional apabila program berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Penerima menggunakan dana bantuan sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga penerima manfaat dapat mencapai pendidikan yang layak dan mendorong terjadinya mobilitas sosial. Tetapi dapat juga mengalami fungsi yang negatif dan disfungsional apabila aparat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum di buku pedoman Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga masyarakat tidak mengetahui tujuan awal digunakannya dana tersebut, menyebabkan mereka menggunakan dana bantuan untuk keperluan lain (bersifat konsumtif) yang seharusnya digunakan untuk keperluan

pendidikan. Kemudian menetapkan apakah keseimbangan diantara keduanya lebih merujuk pada fungsi negatif atau positif, jika positif berarti hal tersebut menjadi fungsional tetapi jika negatif hal tersebut menjadi disfungsional.

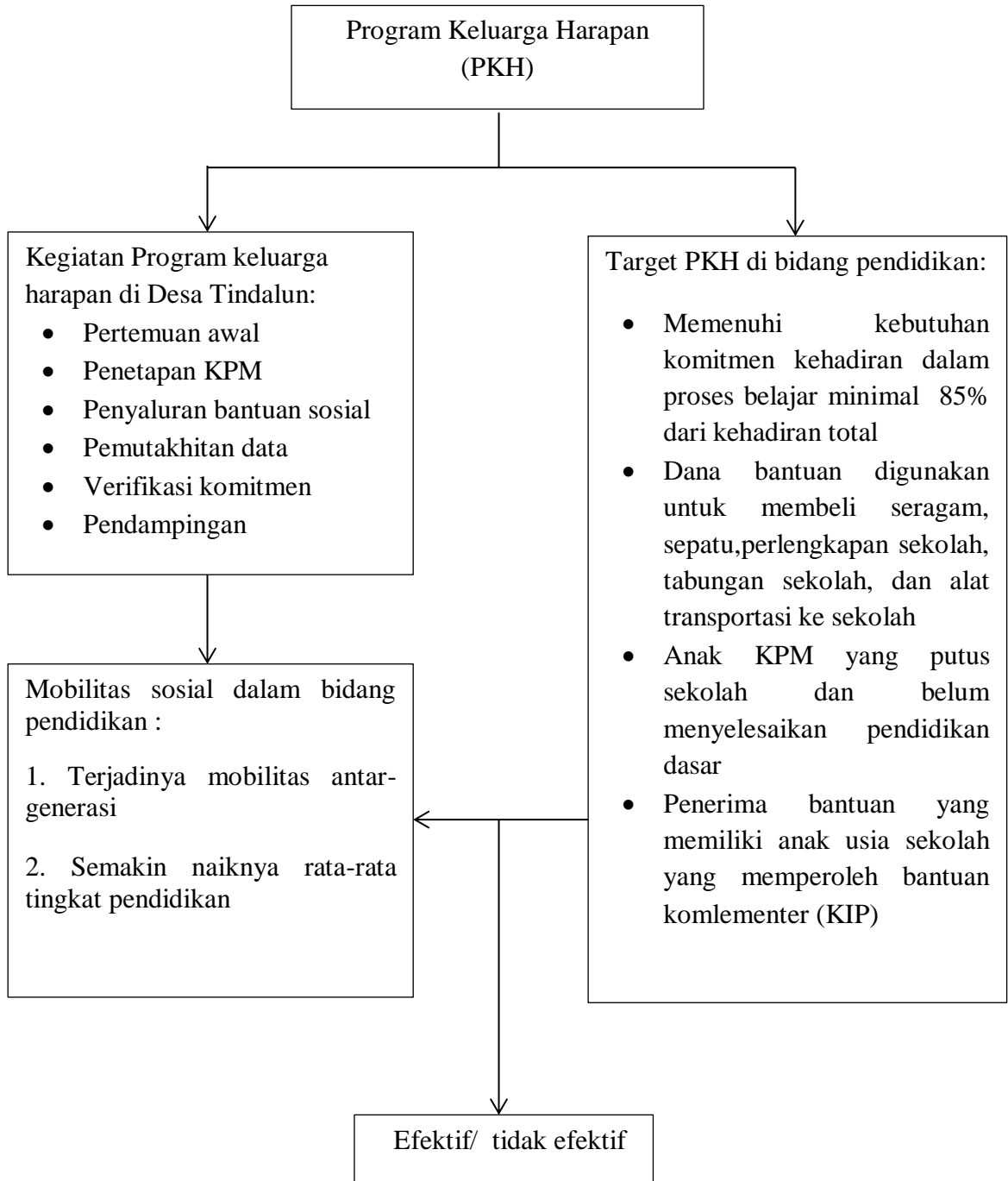
E. Kerangka Pikir

Pemerintah telah menyusun strategi dan upaya untuk menanggulangi dan meminimalisir permasalahan kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah kemiskinan. Salah satu bentuk bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang kurang mampu. Program tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program merupakan rencana yang dirancang secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana digunakan sebagai acuan untuk mengarahkan jalannya kegiatan. Kemudian kegiatan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai rencana dari program.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang mempunyai tujuan awal yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang telah dibuat khususnya di bidang pendidikan yaitu; (1) memenuhi kebutuhan komitmen kehadiran dalam proses belajar minimal 85% (2) dana bantuan digunakan untuk membeli seragam, sepatu, perlengkapan sekolah, tabungan sekolah, dan biaya transportasi ke sekolah (3) Anak KPM yang putus sekolah dan masih berusia 6-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (4) Penerima bantuan yang memiliki anak usia sekolah memperoleh bantuan komplementer

(beasiswa KIP). Untuk mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan tersebut, dibutuhkan tindakan yang konkret untuk melaksanakan program. Tindakan yang konkret atau kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pertemuan awal, penetapan KPM, penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan pendampingan. Berdasarkan tujuan awal yang telah ditetapkan dan kegiatan program tersebut dalam pelaksanaannya. Dengan mengkaji hal tersebut dapat diketahui PKH dapat mendorong mobilitas sosial di bidang pendidikan. Maka indikator penentu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kenaikan rata-rata tingkat pendidikan dan terjadi mobilitas antargenerasi. Kemudian efektivitas diukur dengan membandingkan tujuan awal yang ditetapkan dan capaiannya. Dengan melihat sejauh mana tujuan PKH tercapai. Jika tercapai, program tersebut dikatakan efektif/fungsional dan jika tidak dapat dikatakan tidak efektif/disfungsional. Berikut ini adalah skema kerangka berpikir dari penelitian ini.

Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Secara Sederhananya, definisi operasional diartikan sebagai panduan yang menjelaskan kepada peneliti bagaimana mengukur variabel secara khusus. Definisi operasional memudahkan peneliti dalam menentukan metode untuk mengukur suatu variabel dan menentukan indikator yang lebih spesifik sehingga lebih mudah diukur dan diuji secara empiris. Definisi operasional merealisasikan makna yang dimaksudkan dari suatu konsep yang terkait dengan studi tertentu dan memberikan beberapa kriteria untuk mengukur keberadaan suatu konsep empiris.

Mengembangkan definisi operasional adalah proses yang harus dilalui peneliti sebelum mengukur variabel turunan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Terkadang konsep, pernyataan, dan hipotesis bersifat abstrak dan tidak sesuai atau menggambarkan kondisi empiris dari fenomena sosial yang dipelajari. Oleh karena itu, peneliti harus menjelaskan konsep atau hipotesis sesuai dengan gambaran sebenarnya dari tempat penelitian, definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tercapainya tujuan awal program keluarga harapan dalam bidang pendidikan yang ditetapkan sebelumnya. Efektivitas program dalam penelitian ini adalah:

Memenuhi kebutuhan komitmen kehadiran dalam proses belajar minimal 85%.

- a. Dana bantuan digunakan untuk membeli seragam, sepatu, perlengkapan sekolah, tabungan sekolah.
- b. Anak KPM yang putus sekolah dan masih berusia 6-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
- c. Penerima bantuan yang memiliki anak usia sekolah memperoleh bantuan komplementer (KIP).

Mengacu pada indikator yang diukur terkait efektivitas atau tujuan awal dari Program Keluarga Harapan (PKH), jika tujuan awal dari PKH tercapai maka penerima manfaat dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya bahkan ke perguruan tinggi sekalipun, yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah pendidikan. Pendidikan sebagai satu lembaga yang memberikan bekal keterampilan, skil, dan pengetahuan. Sehingga seseorang dapat memperoleh posisi yang bagus dalam suatu lingkungan dan meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan makna dari mobilitas sosial yaitu perpindahan status dari posisi yang satu ke posisi yang lainnya baik vertikal atau horizontal. Pada umumnya lembaga pendidikan merupakan saluran yang konkret dari mobilitas sosial vertikal.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan konkret yang dilakukan untuk melaksanakan program. Didalamnya melibatkan penggunaan sumber daya, termasuk waktu, tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan.

Kegiatan yang dimaksud dalam penelitian kali ini yaitu:

- a. Pertemuan awal (Validasi dan sosialisasi)
- b. Penetapan KPM
- c. Penyaluran bantuan social
- d. Pemutakhiran data
- e. Verifikasi komitmen
- f. Pendampingan (Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2))

3. Mobilitas Sosial Dalam Pendidikan

Mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok ke status sosial yang lebih tinggi atau rendah, dan sederajat. Mobilitas sosial dalam bidang pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Semakin naiknya rata-rata tingkat pendidikan
- b. Terjadi mobilitas antargenerasi

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nama peneliti: Fitriani Gaffar Judul dan tahun penelitian: “Kebijakan Sosial Program Keluarga Harapan Pada Bidang Pendidikan di Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros”. (Skripsi (2022)).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan program keluarga harapan. Partisipasi pendidikan pada anak keluarga penerima manfaat semakin meningkat, tingkat pekerja anak yang sudah semakin berkurang, semangat belajar pada anak keluarga penerima manfaat semakin meningkat, dan adanya bantuan lanjutan dari pendamping PKH membantu anak-anak KPM untuk melanjutkan pendidikan di tingkat universitas. Setiap bulannya diadakan pelatihan keterampilan. Adapun kendala dalam meningkatkan pendidikan KPM yaitu penerima bantuan tidak tepat sasaran, kehadiran anak KPM kurang dari 85%, dan bantuan PKH yang diberikan tidak digunakan sebagaimana Semestinya.

2.	<p>Nama peneliti: Nur Fahira Syamsir Judul dan tahun penelitian: “Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. Skripsi (2014).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>1. Implementasi PKH di bidang pendidikan di kecamatan Tamalate sudah berjalan dengan baik, karena pelaksanaannya selalu dikawal oleh pendamping yang sudah direkrut oleh pemerintah pusat.</p> <p>2. Pendamping selalu mengadakan pertemuan secara rutin yaitu pertemuan kelompok, pendamping selalu menanamkan pemahaman mengenai PKH dan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak RTSM yang dapat meningkatkan kualitas SDM.</p> <p>3. Pendamping juga selalu melaksanakan kegiatan pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan pemberian bantuan yang dilakukan secara rutin yaitu setiap 3 bulan sekali.</p> <p>4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PKH pendidikan dilihat dari tingkat implementability yaitu faktor isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.</p> <p>5. Permasalahan yang dihadapi yaitu: Koordinasi lintas sektoral, verifikasi data, dan tidak ada pelaporan mengenai penerima program dari pendamping.</p>
3.	<p>Nama Peneliti: Rani Lestari Judul dan tahun penelitian: “Pelaksanaan Program</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>1. Penyampaian informasi terkait PKH sudah dilaksanakan secara menyeluruh tetapi belum maksimal.</p> <p>2. Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Malang, belum memadai dikarenakan satu orang pendamping bertanggung jawab lebih dari 400 penerima</p>

	<p>Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang". Skripsi (2018).</p>	<p>manfaat bantuan PKH di setiap Kecamatan.</p> <p>3. Pelaksana PKH bertugas menjalankan data dari pusat yaitu Kementerian Sosial. Akan tetapi data yang diberikan oleh pusat belum tentu benar, sehingga menghambat pelaksana PKH untuk melangkah ke lapangan dikarenakan kebanyakan data yang tidak sesuai dilapangan.</p> <p>5. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Malang yang telah dilaksanakan dari tahun 2013, menjadi salah satu program yang membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di Kabupaten Malang.</p>
--	--	--

4.	<p>Nama Peneliti: Dedi Utomo, Abdul Hakim, dan Heru Ribawanto. Judul dan tahun penelitian: “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana PKH Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri”.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>1. Berdasarkan hasil penelitian program ini telah membantu mengurangi kebutuhan hidup RTSM. 2. Jumlah peserta PKH juga mengalami penurunan penerima program yang pada awal pelaksanaan 692 peserta dan pada tahun 2013 berkurang menjadi 528 peserta. 3. Hasil evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut dengan adanya sanksi yang diberikan.</p>
----	---	---	---

5.	<p>Nama peneliti: Urika Tri Astari dan Argo Pambudi.</p> <p>Judul dan tahun penelitian: “Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Bantul”. Jurnal (2017).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Efektivitas program keluarga harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kecamatan Pandak tidak efektif . Ada beberapa kendala maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga membuat program ini menjadi tidak efektif, kendala tersebut diantaranya: Kurangnya dana untuk memberikan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH, kurangnya ketersediaan sumber daya pendamping, tidak adanya mekanisme maupun aturan yang mengharuskan pelaporan penggunaan dana bantuan oleh peserta PKH, semakin menurunnya kepatuhan peserta PKH, dan data base penerima bantuan PKH tidak selalu diperbaharui sehingga menyebabkan bantuan PKH kurang tepat sasaran.</p>
6	<p>Nama peneliti: Musdalipah</p> <p>Judul dan tahun penelitian: “Mobilitas Sosial Antar-Generasi (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Kampung Maccini Baji,</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>1. Pendidikan nelayan di kampung Maccini baji tergolong masih rendah dan tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Mobilitas antargenerasi yang terjadi pada aspek ini sebanyak 5 nelayan tergolong melakukan mobilitas horizontal dan satu informan lainnya bersifat vertikal naik pendidikan yang rendah tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi kemauan pribadi informasi serta kondisi keluarga yang mengharuskan mereka putus sekolah.</p> <p>2. Pekerjaan pada aspek pekerjaan masing-masing informan memiliki orang tua yang</p>

	<p>Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep)”. Skripsi (2021).</p>		<p>bekerja sebagai nelayan sehingga mobilitas sosial yang terjadi bersifat horizontal. Adapun yang membedakan dengan generasi orang tuanya adalah bentuk pekerjaan yang dilakukan pada generasi orang tua informan hanya mengenal mengandalkan hasil tangkapan ikan sedangkan informasi sendiri sudah lebih beragam diantaranya ikan, kepiting serta rumput laut.</p> <p>3. Modal sosial, pada aspek ini dalam membangun kerjasama dan interaksi dengan nelayan lainnya sebanyak dua informan bergabung dalam kelompok nelayan melalui kelompok nelayan tersebut mereka diberikan bantuan berupa Alat tangkap perahu. Serta peralatan penunjang lainnya, akan tetapi empat informan lainnya tidak bergabung dalam kelompok nelayan tersebut sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan.</p> <p>4. pendapatan, dari aspek pendapatan pada keluarga nelayan cenderung bersifat fluktuatif. Menurut informan pendapatannya saat ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga, berbeda dengan masa orang tuanya dahulu.</p>
7	<p>Nama peneliti: Aira Saskia. Judul dan tahun penelitian: “Efektivitas</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tindalun sebagai unit pelaksana program dapat dikatakan belum cukup efektif. Sesuai dengan perspektif efisiensi, kecakupan perataan, responsivitas, dan ketepatan. Masih ditemukan</p>

<p>Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Tindalun, Kecamatan Anggraja, Kabupaten Enrekang". Skripsi (2020).</p>	<p>warga yang kurang mampu tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan masih ditemukan data peserta PKH yang tidak akurat serta tidak memenuhi kriteria. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan di desa tindalun melalui PKH Memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat tetapi Seiring berjalannya waktu. Program Keluarga Harapan di Desa Tindalun belum mampu memutuskan mata rantai kemiskinan yang ada di masyarakat. Hanya saja PKH memberi sisi positif pada meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menekan Tingginya tingkat kemiskinan di Desa Tindalun. Kemudian Faktor penghambat dan faktor pendukung terlaksananya PKH di Desa Tindalun sebagai unit pelaksana program adalah tingkat antusias masyarakat. Serta faktor penghambat PKH adalah ketepatan sumber data, keadaan geografis, dan fasilitas penunjang.</p>
---	--

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama membahas mengenai jalannya program keluarga harapan. Penelitian terdahulu pada tabel no 1 dan 2 dengan penelitian yang akan dilakukan, lebih berfokus pada bidang pendidikan. Penelitian pada tabel ke 5 dan penelitian yang akan

diteliti juga membahas mengenai efektivitas program keluarga harapan. Penelitian terdahulu pada tabel no.6 membahas mengenai efektivitas program keluarga harapan dan lokasi penelitian yang serupa.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teori struktural fungsionalisme Robert K. Merton dan teori yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Hasil dari penelitian terdahulu yang dipaparkan dalam tabel lebih fokus pada kendala dalam meningkatkan partisipasi keluarga penerima manfaat, apa yang menjadi faktor pendorong dan pendukung program keluarga harapan, dan pelaksanaan program keluarga harapan dalam mendukung meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup rumah tangga sangat miskin. Sedangkan pada penelitian ini menggambarkan bagaimana kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan di Desa Tindalun serta melihat bagaimana efektivitas program keluarga harapan sebagai upaya mendorong mobilitas sosial di bidang pendidikan dengan melihat mobilitas antargenerasi dan terjadinya peningkatan dalam jenjang pendidikan. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tabel no.6 yaitu pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, membahas mengenai PKH dalam mengatasi kemiskinan, dalam skripsi tersebut membahas mengenai faktor

pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH di Desa Tindalun. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu tabel no.6 dan penelitian yang akan dilakukan sama tetapi pada skripsi tersebut indikator yang digunakan dalam mengukur variabel efektivitas yaitu efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Faktor pendorong dilihat dari tingkat antusias warga dan koordinasi. Faktor penghambat indikator yang akan diukur yaitu sumber data, keadaan geografi, fasilitas, dan penunjang. Sedangkan penelitian yang akan digunakan dalam mengukur efektivitas program keluarga harapan dengan melihat apakah tujuan dari program yang telah tercantum dalam buku pedoman PKH akan tercapai atau tidak, dan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan PKH berjalan di Desa Tindalun.